

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	
Media Online	Radar Solo

Wilayah: Kabupaten Karanganyar

1.045 Bidang Aset Milik Pemkab Karanganyar Belum Bersertifikat

<https://radarsolo.jawapos.com/daerah/karanganyar/02/08/2022/1-045-bidang-aset-milik-pemkab-karanganyar-belum-bersertifikat/>

KARANGANYAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar terus melakukan sertifikasi aset milik pemerintah yang mencapai 1.045 bidang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar Sutarno mengungkapkan, dari 2.299 bidang aset milik Pemkab Karanganyar yang sudah teregister, 1.254 bidang sudah memiliki sertifikat resmi. Sedangkan 1.045 bidang belum memiliki sertifikat.

"Kami ingin tahun ini segera selesai penyertifikatan aset pemkab. Tahapan yang sudah kami lakukan, yakni mengirimkan berkas ke BPN agar segera diproses dan dilakukan verifikasi," kata sekda.

Ditanya terkait kendala yang dihadapi, Sutarno mengaku masalah pendanaan, serta harus antre dengan penyertifikatan bidang masyarakat.

"Kebanyakan bidang yang belum bersertifikat tersebut adalah bidang jalan dan saluran. Kalau untuk yang bidang lainnya, seperti tanah yang sekarang dijadikan sebagai lokasi perumahan, saat ini sudah ada sekitar 32 perumahan yang sudah melakukan pengajuan untuk proses pensertifikatan tanah mereka, dan akan menjadi aset milik pemerintah kabupaten," terang sekda.

Sebelumnya, Kantor BPN Kabupaten Karanganyar telah menyelamatkan 1.048 bidang tanah aset milik Pemkab Karanganyar, 2021 lalu. Bupati Karanganyar Juliyatmono mengungkapkan, penyelamatan aset terus dilakukan. Beberapa aset yang rawan disalahgunakan di antaranya fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang sebelumnya dibangun oleh sejumlah pengembang perumahan. Serta beberapa bidang tanah seperti saluran dan jalan.

"Saya tidak ingin ketika dikembangkan sesuatu, kemudian di belakang ada persoalan terkait kepemilikan. Kalau kepemilikannya sudah jelas, pemerintah bisa mengembangkannya sesuai dengan rencana dasar tata ruang wilayahnya. Kami ingin semua aset milik pemkab itu bisa produktif," tegas bupati.

(rud/adi/dam)